

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas bimbingan dan perlindunganNya pada tahun 2017 Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara (BKN) dapat menjalankan tugas dan fungsi pokok dengan baik. Sepanjang tahun 2017 kami telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan Laporan Kinerja (LKj) Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2017 dapat selesai disusun tepat pada waktunya. LKj merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan.

LKj Kantor Regional XII BKN disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJ Kantor Regional XII BKN dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada publik atas capaian kinerja Kantor Regional XII BKN tahun 2017 dalam memberikan pelayanan kepegawaian kepada masyarakat. LKj mempunyai fungsi sebagai alat pengukuran kinerja dan sebagai alat kendali pencapaian kinerja organisasi. Sedangkan manfaat LKj adalah untuk evaluasi akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan, dan hasil evaluasi dapat dijadikan bahan penyempurnaan perencanaan & pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan lebih lanjut.

Banyak kendala yang kami hadapi pada tahun 2017 yang menyebabkan beberapa target kinerja tidak tercapai, tetapi hal tersebut akan kami gunakan sebagai dasar evaluasi menyeluruh dan feed back dalam perencanaan kinerja kedepan. Dan kami sadari bahwa penyusunan LKj Kantor Regional XII BKN ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan guna penyempurnaannya.

Akhir kata, kami berharap semoga LKj Kantor Regional XII BKN tahun 2017 dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Pekanbaru, 31 Januari 2018
Kepala Kantor Regional XII
Badan Kepegawaian Negara

Andrayati, SH, MM
NIP. 19590621 198603 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Regional XII BKN dimaksudkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Kantor Regional XII BKN berdasarkan Penetapan Kinerja tahun 2017 dan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dalam rangka mewujudkan *Good Governance* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kantor Regional XII BKN merupakan instansi BKN di daerah yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BKN dalam pembinaan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian di wilayah kerjanya. Oleh karena itu, LKj Kantor Regional XII BKN merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum pada Rencana Strategis Kantor Regional XII BKN tahun 2015-2019.

Rencana Strategis memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, serta Indikator Kinerja Utama (IKU). Visi Kantor Regional XII BKN adalah Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian dan Pembinaan Manajemen Kepegawaian yang Efektif di Wilayah Kerja, dengan Misi yaitu : 1) Meningkatkan kualitas pelayanan mutasi, status kepegawaian, pengangkatan dan pensiun; 2) Meningkatkan kualitas data dan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian; 3) Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; 4) Meningkatkan efektifitas penerapan sistem penilaian kinerja pegawai; dan 5) Mengembangkan kapabilitas SDM dan manajemen internal organisasi. Sedangkan dalam Rencana Strategis Kantor Regional XII BKN memuat sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2015-2019 yaitu : 1) Meningkatkan kualitas layanan mutasi dan status pegawai; 2) Meningkatkan kualitas layanan pengangkatan dan pensiun pegawai; 3) Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan arsip dan data kepegawaian; 4) Meningkatkan efektifitas pembinaan/ supervisi dan pengendalian kepegawaian, serta sistem penilaian kinerja; 5) Meningkatkan efektifitas koordinasi perencanaan

program, pengelolaan administrasi keuangan dan sumber daya manusia; dan 6) Meningkatkan kenyamanan bekerja pegawai.

Sedangkan dari sisi pencapaian kinerja menunjukkan bahwa terdapat 21 Indikator Kinerja Utama berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun dalam pencapaian target kinerja utama tersebut, didalamnya terdapat capaian kinerja kegiatan yang melampaui target kinerja yang ditetapkan, antara lain :

- a. Pencapaian sasaran strategis I : Meningkatkan kualitas layanan mutasi dan status kepegawaian, keluaran dari indikator kinerja utama secara keseluruhan telah terealisasi diatas 100% yaitu Indeks Kepuasan PNS terhadap layanan mutasi dan status kepegawaian dengan nilai Baik. Pesentase penyelesaian pelayanan mutasi dengan tepat waktu dicapai dengan 100%, durasi penyelesaian pelayanan mutasi dan status kepegawaian terlaksanakan selama 17 menit perberkas, dan persentase penetapan usul mutasi dan status kepegawaian dengan tepat waktu dicapai sebesar 100%.
- b. Pencapaian sasaran strategis II : Meningkatkan kualitas layanan pengangkatan dan pensiun pegawai telah terealisasi dengan baik yang hasilnya melebihi dari target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama meliputi Indeks kepuasan PNS terhadap layanan pengangkatan dan pensiun yang berhasil dicapai dengan nilai A. Durasi penyelesaian pelayanan pengangkatan dan pensiun telah terealisasi 60 menit perberkas dan persentase pengelolaan tata naskah penetapan SK/Nota Pensiun kedalam lemari tata naskah tercapai 64,2%.
- c. Pencapaian sasaran strategis III : Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan arsip dan data kepegawaian, indikator kinerja utamanya meliputi Persentase akurasi data kepegawaian (updating database) terealisasi sebesar 98,95%, durasi penyajian data arsip kepegawaian tercapai dengan 10 menit, persentase dokumen tata naskah yang telah disusun berdasarkan NIP yang baru telah tercapai sebesar 41,6%. Persentase Instansi yang telah memanfaatkan SAPK yaitu 100%, persentase instansi yang memanfaatkan CAT sebesar 24,4% dari target 30%, dan persentase pemanfaatan Sistem Aplikasi Internal Kantor Regional telah tercapai 100%.

- d. Pencapaian sasaran strategis IV : Meningkatkan Efektifitas pembinaan/supervisi dan pengendalian kepegawaian, serta sistem penilaian kinerja yang tercapai melebihi dari target yang telah ditetapkan yang meliputi persentase instansi yang menaati NSP Bidang kepegawaian terealisasi sebesar 53,66%, persentase instansi yang telah dilakukan supervisi kepegawaian tercapai sebesar 68,29% dan persentase instansi yang telah dilakukan evaluasi implementasi SKP terealisasi sebesar 100%..
- e. Pencapaian sasaran strategis V : Meningkatkan Efektifitas koordinasi perencanaan program, pengelolaan administrasi keuangan dan sumber daya manusia dimana IKU dan IKK tercapai dengan baik. Dari IKU Indeks kepuasan pelayanan publik terhadap layanan informasi publik memperoleh nilai B, Hasil Evaluasi Inspektorat terhadap SAKIP Kantor Regional mencapai nilai B, Persentase pengembangan kapasitas SDM tercapai 100% dan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit terhadap laporan keuangan Kantor Regional XII tercapai 100%. Sedangkan pada IKK jumlah layanan secara keseluruhan telah terlaksana yaitu 12 bulan dan dokumen fisiknya telah tercapai semuanya secara 100%.

Berdasarkan uraian sasaran strategis dan indikator capaian kinerja Kantor Regional XII BKN tahun 2017 diatas, secara keseluruhan dari IKK dan IKU mencapai target sebesar 123,64 % dan yang seluruhnya mencapai target sebanyak 12 indikator kinerja utama. Dalam pelaksanaannya, dari indikator utama diturunkan ke dalam target capaian kinerja dalam indikator kinerja kegiatan. Dari sebagian besar target dalam indikator kinerja kegiatan mencapai target yang ditetapkan, bahkan terdapat beberapa capaian kerjanya yang melebihi 100%. Namun demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja kegiatan yang belum mencapai target, disebabkan keterkaitan dengan *Stakeholder*. Oleh karena itu Kantor Regional XII BKN perlu melakukan langkah-langkah guna mendukung pencapaian target kinerja baik pada tingkatan kinerja utama maupun kinerja kegiatan pada semua sasaran strategis dan sebagai evaluasi guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Organisasi	2
C. Isu-Isu Strategis (Strategic Issued).....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Rencana Kerja.....	9
B. Perjanjian Kinerja	12
C. Rekomendasi.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran	61
BAB IV PENUTUP.....	64

DAFTAR TABEL

TABEL 1. KOMPOSISI PEGAWAI PERJENIS KELAMIN	3
TABEL 2. KOMPOSISI PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN.....	3
TABEL 3. KOMPOSISI PEGAWAI MENURUT GOLONGAN	4
TABEL 4. KOMPOSISI PEGAWAI DALAM JABATAN STRUKTURAL.....	4
TABEL 5. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) KANTOR REGIONAL XII BKN	13
TABEL 6. HASIL PENGUKURAN KINERJA KANTOR REGIONAL XII BKN TAHUN 2017	20
TABEL 7. NILAI PERSEPSI INTERVAL IKM, INTERVAL KONVERSI IKM, MUTU PELAYANAN DAN KINERJA UNIT PELAYANAN .	27
TABEL 8. NILAI UNSUR-UNSUR PELAYANAN	27
TABEL 9. PERBANDINGAN INDEKS KEPUASAN TERHADAP LAYANAN MUTASI DAN STATUS KEPEGAWAIAN	28
TABEL 10. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 1.3.....	29
TABEL 11. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SASARAN I	29
TABEL 12. NILAI PERSEPSI INTERVAL IKM, INTERVAL KONVERSI IKM, MUTU PELAYANAN DAN KINERJA UNIT PELAYANAN	32
TABEL 13. NILAI UNSUR-UNSUR PELAYANAN	32
TABEL 14. PERBANDINGAN INDEKS KEPUASAN TERHADAP LAYANAN PENGANGKATAN DAN PENSIUN	33
TABEL 15. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2.2.....	33
TABEL 16. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SASARAN II	37
TABEL 17. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 3.1.....	40
TABEL 18. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 3.3.....	41
TABEL 19. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 3.4.....	42
TABEL 20. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SASARAN III	44
TABEL 21. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 5.1.....	47
TABEL 22. DAFTAR INSTANSI YANG MENERAPKAN PENILAIAN KINERJA ASN.....	47
TABEL 23. DAFTAR WORKSHOP DAN RAKOR TAHUN 2017	49
TABEL 24. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SASARAN IV	52
TABEL 25. NILAI PERSEPSI INTERVAL IKM, INTERVAL KONVERSI IKM, MUTU PELAYANAN DAN KINERJA UNIT PELAYANAN	54
TABEL 26. NILAI UNSUR-UNSUR PELAYANAN	54
TABEL 27. PERBANDINGAN INDEKS KEPUASAN TERHADAP LAYANAN PENGANGKATAN DAN PENSIUN	55
TABEL 28. PERBANDINGAN INDEKS KEPUASAN TERHADAP KETERSEDIAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	57
TABEL 29. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SASARAN V	61
TABEL 30. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM (DALAM RUPIAH).....	61
TABEL 31. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER BELANJA (DALAM RUPIAH)	62
TABEL 32. REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM	63
TABEL 32. REALISASI ANGGARAN PERBELANJA	63

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. APLIKASI SELAIS.....	35
GAMBAR 2. LAYANAN SMS KEPEGAWAIAN	35
GAMBAR 3. OWNCLOUD	36
GAMBAR 4. APLIKASI E-TATA NASKAH	40
GAMBAR 5. PENGELOALAN TATA NASKAH KEPEGAWAIAN.....	43
GAMBAR 6. RAKOR KEPEGAWAIAN SE-WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU	50
GAMBAR 7. PENGEMBANGAN JALAN KANTOR REGIONAL XII BKN	58
GAMBAR 8. PENGEMBANGAN GEDUNG KANTOR REGIONAL XII BKN	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja (LKj). LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kantor Regional XII BKN sebagai instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyusun LKj yang merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik serta menjadi media informasi kepada publik mengenai capaian kinerja yang telah dilakukan Kantor Regional XII BKN selama tahun 2017.

Kantor Regional XII BKN menjalankan sebagian tugas dan fungsi BKN yang mempunyai peran strategis dalam membangun sumber daya aparatur sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2025 di bidang Hukum dan Aparatur. Pembangunan bidang aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik untuk mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai bidang lainnya.

Dalam rangka menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi BKN di daerah, Kantor Regional XII BKN memiliki wilayah kerja yang meliputi 3 (tiga) Provinsi yaitu, Prov. Riau, Prov. Sumatera Barat dan Prov. Kepulauan Riau dan 41 (empat puluh satu) Kab/Kota di lingkungan Prov. Riau, Prov. Sumatera Barat dan Prov.

Kepulauan Riau serta 26 (dua puluh enam) Instansi Vertikal. Adapun Jumlah PNS yang menjadi beban kerja Kantor Regional XII BKN berdasarkan data per 31 Desember 2017 adalah 306.243 PNS.

B. Gambaran Organisasi

Kantor Regional XII BKN dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pembentukan Kantor Regional X, XI, dan XII Badan Kepegawaian Negara. Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN, Kantor Regional adalah instansi Badan Kepegawaian Negara di daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kantor Regional BKN mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Regional XII BKN menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi bimbingan, pemberian petunjuk teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
2. Pemberian pertimbangan, persetujuan dan atau penetapan mutasi kepegawaian bagi PNS Instansi Pusat dan Instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penetapan pensiun dan status kepegawaian PNS Instansi Pusat di wilayah kerjanya.
4. Penetapan pensiun dan status kepegawaian PNS Instansi Daerah di wilayah kerjanya.
5. Penyelenggaraan dan pemeliharaan jaringan informasi data kepegawaian PNS Instansi Pusat dan Instansi Daerah di wilayah kerjanya.

6. Pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi penilaian kinerja dan penyusunan standar kompetensi pegawai ASN di wilayah kerjanya.
7. Pengelolaan teknologi informasi penilaian kinerja pegawai ASN di wilayah kerjanya dan ;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKN.

Berdasarkan Peraturan Kepala BKN No. 36 tahun 2014 tanggal 28 November 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN, Struktur Organisasi Kantor Regional XII BKN terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian;
- d. Bidang Pengangkatan dan Pensiun;
- e. Bidang Informasi Kepegawaian; dan
- f. Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian.

Sumber daya manusia pegawai negeri sipil merupakan sumber daya utama penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Regional XII BKN, berdasarkan data pada 31 Desember 2017, SDM Kantor Regional XII BKN berjumlah 88 (delapan puluh delapan) Pegawai, dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1. Komposisi Pegawai Perjenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN				JUMLAH	%
	LAKI - LAKI	%	PEREMPUAN	%		
1	38	43,18%	50	56,82%	88	100%

Tabel 2. Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	S3	-	-
2	S2	11	12,5 %
3	S1	44	50 %

4	D3	32	36,4 %
5	SMA	1	1,1 %
	JUMLAH	78	100 %

Tabel 3. Komposisi Pegawai Menurut Golongan

NO	GOLONGAN								JUMLAH
	IV	%	III	%	II	%	I	%	
1	6	6,8 %	53	60,3 %	29	32,9 %	-	-	88

Tabel 4. Komposisi Pegawai dalam Jabatan Struktural

NO	JABATAN PADA UNIT KERJA	JABATAN			JUMLAH
		JPT Pratama	Administrator	Pengawas	
1	Kepala Kantor	1	-	-	1
2	Bagian Tata Usaha	-	1	3	4
3	Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian	-	1	4	5
4	Bidang Pengangkatan dan Pensiun	-	1	4	5
5	Bidang Informasi dan Kepegawaian	-	1	4	5
6	Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian	-	1	3	4
	JUMLAH	1	5	18	24

Dalam pelaksanaan tugas perkantoran, pada tahun 2017 Kantor Regional XII BKN didukung oleh tenaga non pegawai negeri sipil, meliputi tenaga pengamanan kantor sebanyak 14 (empat belas) orang, tenaga pengemudi sebanyak 3 (tiga) orang, petugas kebersihan sebanyak 9 (sembilan) orang dan tenaga pramubakti sebanyak 3 (tiga) orang.

Dalam mendukung terwujudnya Visi BKN dan optimalisasi peran Kantor Regional XII BKN dalam pelayanan kepegawaian, Kantor Regional XII BKN telah menetapkan visi sebagai berikut :

**“Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian dan Pembinaan
Manajemen Kepegawaian yang Efektif di Wilayah Kerja
Kantor Regional XII BKN Pekanbaru”**

Uraian Visi :

1. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN di wilayah kerjanya. Penjabaran tugas ini adalah berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan manajemen ASN serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK Manajemen ASN.
2. Terdapat nilai yang terkandung di dalam visi tersebut yaitu :
 - a. Pelayanan Prima
 - Kantor Regional XII BKN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanahkan melalui perundang-undangan yang berlaku dengan memaksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat ASN demi mewujudkan pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan masyarakat.
 - Kantor Regional XII BKN dalam memberikan layanan kepegawaian berkomitmen untuk melakukan perbaikan terus menerus menuju terwujudnya pelayanan prima kepegawaian (*excellent Service*) dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan menciptakan layanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, dan *real time*. Dengan demikian layanan kepegawaian Kantor Regional XII BKN merupakan layanan

yang tangguh, kuat, terdepan dan dapat dipercaya oleh masyarakat/stakeholder.

b. Efektif

- Kantor Regional XII BKN melakukan upaya peningkatan kapabilitas dan kompetensinya sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN dan pelayanan kepegawaian.
- Kantor Regional XII BKN akan memberikan pembinaan manajemen kepegawaian yang efektif serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK Manajemen ASN.

Implementasi atau penjabaran visi sebagaimana dikemukakan di atas, merupakan tantangan yang harus diwujudkan secara nyata dalam bentuk pola tindak oleh segenap jajaran pegawai di lingkungan Kantor Regional XII BKN. Sebagai penjabaran dari visi tersebut ditetapkan misi yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik.

Adapun Misi Kantor Regional XII BKN ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan mutasi, status kepegawaian, pengangkatan dan pensiun;
2. Meningkatkan kualitas data dan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian;
3. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
4. Meningkatkan efektifitas penerapan sistem penilaian kinerja pegawai;
5. Mengembangkan kapabilitas SDM dan manajemen internal organisasi.

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi yang sudah ditetapkan, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru merumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian yang Modern Berbasis IT;
2. Terwujudnya Pembinaan dan Supervisi Manajemen ASN;
3. Terwujudnya Manajemen Internal yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

Adapun sasaran strategis dari tujuan tersebut diatas diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas koordinasi perencanaan program sumberdaya serta pengelolaan administrasi;
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka menjamin kelancaran tugas perkantoran di Kantor Regional XII BKN;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian;
4. Meningkatnya Kualitas Data Kepegawaian;
5. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepegawaian.

C. Isu-isu Strategis

Kantor Regional XII BKN dibentuk pada tahun 2006 dan mulai operasional pada tahun 2007 dengan kondisi sumber daya yang terbatas. Selama kurun waktu tersebut tentunya masih dijumpai kekurangan/kendala/kelemahan yang merupakan permasalahan baik internal maupun eksternal. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Layanan Kepegawaian Yang Belum Optimal

Layanan kepegawaian sebagai *core business* Kantor Regional XII BKN Pekanbaru masih dirasakan kurang optimal. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan perbaikan layanan secara terus menerus dari suatu instansi. Oleh sebab itu, masih banyak perbaikan dan penungkatan kualitas dalam melayani masyarakat demi tercapainya kepuasan masyarakat dalam bidang pelayanan kepegawaian.

2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Kantor Regional XII BKN

Berdasarkan analisis beban kerja yang dilakukan, menunjukkan bahwa jumlah SDM Kantor Regional XII BKN masih belum memadai dimana dengan beban kerja sebanyak 306.243 pegawai, SDM yang dibutuhkan adalah sebanyak 130 orang sehingga masih kekurangan \pm 50 orang pegawai. Selain daripada itu, masih banyaknya pegawai yang belum mengikuti Diklat Teknis maupun Fungsional mengindikasikan kompetensi pegawai masih belum memadai secara keseluruhan.

3. Kualitas Jaringan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

Penggunaan SAPK sebagai sarana penunjang layanan mutasi kepegawaian sering mengalami permasalahan, yang menyebabkan tidak optimalnya layanan. Hal ini disebabkan kualitas jaringan yang kurang memadai.

4. Data PNS yang belum akurat

Belum optimalnya updating dan rekonsiliasi Data PNS serta keterbatasan kualitas jaringan di beberapa daerah sehingga Database yang dikelola Kantor Regional XII BKN belum akurat dan *up to date*. Di samping itu, ketidakakuratan data juga disebabkan inkonsistensi Instansi dalam menyampaikan perubahan-perubahan data kepegawaian.

5. Kurangnya Kompetensi Pengelola Kepegawaian Instansi

Kondisi *existing* dalam Pembinaan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN masih banyak ditemukan berbagai permasalahan kepegawaian, kesalahan dalam penerapan peraturan kepegawaian, usul mutasi kepegawaian yang tidak lengkap/tidak memenuhi syarat, dan lain-lain. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman dan kompetensi para pengelola kepegawaian di instansi masih kurang memadai.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kerja

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, BKN sebagai lembaga penyelenggara manajemen ASN memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan manajemen kepegawaian dan pelayanan administrasi kepegawaian yang melayani seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Berkenaan hal tersebut, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru akan melaksanakan :

1. Layanan Mutasi Kepegawaian

Dalam rangka memberikan pelayanan mutasi kepegawaian dalam bentuk pemberian persetujuan teknis kenaikan pangkat, nota persetujuan teknis, penyesuaian masa kerja, penetapan persetujuan teknis mutasi lain-lain dan Penetapan SK pindah instansi di lingkungan wilayah kerja Kantor Regional XII BKN. Kantor Regional XII BKN mempunyai peran strategis dalam memberikan layanan tepat waktu dan tepat mutu sehingga instansi yang dilayani puas dan tidak ada keluhan. Adapun metode yang akan dilakukan adalah dengan melakukan penjadwalan usul KP oleh instansi serta dengan memfasilitasi pengelola kepegawaian instansi dalam memahami dan mengimplementasikan peraturan perundangan yang berlaku sehingga mampu meminimalisir usulan mutasi kepegawaian yang dikategorikan berkas tidak lengkap (BTL) dan berkas tidak memenuhi syarat (TMS). Pemanfaatan Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Aplikasi real time monitoring berkas “Selais” akan lebih memberikan pelayanan yang efektif, nyaman dan transparan bagi para pengelola kepegawaian yang datang ke Kantor Regional XII BKN. Selain itu juga, dalam rangka penerapan Perka BKN No. 25 Tahun 2013, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru telah mengembangkan *cloud system* untuk pengusulan berkas Kenaikan Pangkat dari Instansi, sehingga Proses

Penetapan NP Kenaikan Pangkat PNS dapat lebih cepat, mudah dan *less paper*.

2. Layanan Status Kepegawaian

Dalam rangka memberikan pelayanan Status kepegawaian dalam bentuk Penerbitan Karpeg, Karis/Karsu, dan penetapan CLTN. Kantor Regional XII BKN mempunyai peran strategis dalam memberikan layanan tepat waktu dan tepat mutu sehingga instansi yang dilayani puas dan tidak ada keluhan. Adapun metode yang dilakukan adalah dengan mengembangkan aplikasi internal layanan Karpeg, Karis/Karsu.

3. Layanan Pensiun

Dalam rangka memberikan pelayanan Pensiun Kantor Regional XII BKN mempunyai peran strategis memberikan pelayanan pensiun yang tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat mutu. Adapun metode yang dilakukan adalah menetapkan target penyelesaian SK pensiun PNS yang bersangkutan paling lambat 3 bulan sebelum TMT pensiun serta dengan memfasilitasi pengelola kepegawaian instansi dalam memahami dan mengimplementasikan peraturan perundangan yang berlaku sehingga mampu meminimalisir usulan mutasi kepegawaian yang dikategorikan berkas tidak lengkap (BTL). Selain itu juga Pemanfaatan Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Aplikasi real time monitoring berkas usul “Selais” akan lebih memberikan pelayanan yang efektif, nyaman dan transparan bagi para pengelola kepegawaian yang datang ke Kantor Regional XII BKN.

4. Layanan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara

Dalam rangka memberikan pelayanan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam bentuk persetujuan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Pertimbangan Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih dari 2 tahun. Kantor Regional XII BKN mempunyai peran Strategis dalam memberikan layanan tepat waktu dan tepat mutu.

5. Penyajian Informasi Kepegawaian

Dalam rangka penyajian informasi kepegawaian Kantor Regional XII BKN mempunyai peran strategis untuk menyediakan data yang valid, akurat, dan terkini dengan cara melakukan Rekonsiliasi data dan peremajaan data melalui cloud system sehingga prosesnya dapat lebih cepat, mudah, efektif dan efisien. Untuk Pengelolaan tata naskah kepegawaian yang lengkap, akurat, dan cepat dilakukan dengan cara mengembangkan aplikasi internal E-takah, serta memberikan *support* terhadap penggunaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dalam memperlancar layanan kepegawaian dengan cara memberikan pelatihan, pelayanan konsultasi, dan fasilitasi kepada instansi.

6. Layanan Bimbingan Teknis Kepegawaian

Dalam rangka implementasi perubahan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diantaranya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan berlaku efektifnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil serta peraturan perundangan lainnya, Kantor Regional XII BKN mempunyai peran strategis dengan memberikan pelayanan bimbingan teknis berupa konsultasi dan sosialisasi terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut terhadap instansi pusat dan daerah di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN.

7. Layanan Pendampingan Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian

Sebagai wujud pembinaan terhadap instansi dalam pelaksanaan peraturan di bidang kepegawaian Kantor Regional XII BKN mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan pendampingan terhadap permasalahan atau kasus-kasus kepegawaian dengan menjawab surat-surat permasalahan kepegawaian untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian maupun menjadi saksi/saksi ahli pada persidangan.

8. Layanan Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian

Guna meminimalisir penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian Kantor Regional XII BKN mempunyai peran strategis dalam melaksanakan Supervisi dalam bentuk Pengawasan dan Pengendalian pada instansi serta menganalisis SK Hukuman Disiplin yang telah dikeluarkan oleh instansi.

9. Layanan Internal Perkantoran

Dalam rangka mendukung layanan teknis manajemen kepegawaian, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru melaksanakan layanan perkantoran meliputi layanan ketatausahaan, pengelolaan SDM internal, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan administrasi keuangan dan Asset, serta kehumasan dan keprotokolan.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui penetapan kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan Indikator lain yang relevan.

Perjanjian kinerja ditetapkan untuk dijadikan sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja. Pada tahun 2017, Kantor Regional XII BKN menetapkan target kinerja dengan 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 31 Indikator Kinerja kegiatan (IKK).

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis Kantor Regional XII BKN ditetapkan secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis yang ingin dicapai. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Regional XII BKN dituangkan pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Kantor Regional XII BKN TA 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan kualitas layanan mutasi dan status kepegawaian	Indikator Kinerja Utama	
	1. Indeks Kepuasan PNS terhadap layanan mutasi dan status kepegawaian	B
	2. Persentase penyelesaian pelayanan mutasi dengan tepat waktu	90%
	3. Durasi penyelesaian pelayanan mutasi dan status kepegawaian perberkas	30 Menit
	4. Persentase penetapan usul mutasi dan status kepegawaian dengan tepat	95%
	Indikator Kinerja Kegiatan	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
	1. Jumlah Penetapan Kenaikan Pangkat, PMK, dan Mutasi Lainnya yang ditetapkan	40.000 NP
	2. Jumlah Penetapan Karpeg/Karis/Karsu yang ditetapkan	12.000 Kartu
	3. Jumlah CLTN yang ditetapkan	15 NP
Meningkatkan kualitas layanan pengangkatan dan pensiun pegawai	Indikator Kinerja Utama	
	1. Indeks Kepuasan PNS terhadap layanan pengangkatan dan pensiun	B
	2. Durasi penyelesaian pelayanan pengangkatan dan pensiun perberkas	60 Menit
	3. Persentase pengelolaan tata naskah penetapan SK/Nota Pensiun ke dalam lemari tata naskah	55 %
	Indikator Kinerja Kegiatan	
	1. Jumlah Penetapan NIP CPNS/PNS yang ditetapkan	2.500 NIP
	2. Jumlah Penetapan SK Pensiun yang ditetapkan	6.000 NP
	3. Jumlah Persetujuan Teknis Pengangkatan PNS Lebih dari 2 Tahun	100 NP
	4. Jumlah Penetapan Mutasi Keluarga Pensiunan PNS	210 NP
Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan arsip	Indikator Kinerja Utama	
	1. Persentase akurasi data kepegawaian (updating database)	99%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	
dan data kepegawaian	2. Durasi penyajian data arsip kepegawaian	10 Menit	
	3. Persentase dokumen tata naskah yang telah disusun berdasarkan NIP yang baru	60%	
	4. Persentase instansi yang memanfaatkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	100%	
	5. Persentase instansi yang memanfaatkan CAT	30%	
	6. Persentase pemanfaatan Sistem Aplikasi Internal Kantor Regional	100%	
	Indikator Kinerja Kegiatan		
	1. Jumlah Laporan Pelaksanaan CAT	12 Laporan	
	2. Jumlah Dokumen kepegawaian yang diverifikasi	40.000 Tata Naskah	
	3. Jumlah Dokumen kepegawaian yang disimpan dan dipelihara	259.436 Dokumen	
	4. Jumlah Dokumen kepegawaian yang direkam ke dalam CD	40.000 Data	
	5. Jumlah Dokumen Laporan Statistik Kepegawaian	1 Laporan	
	6. Jumlah Konversi NIP	814 Data	
	7. Rekonsiliasi Data dalam Database Kepegawaian	41 Instansi	
	Meningkatkan	Indikator Kinerja Utama	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	
efektifitas pembinaan / supervisi dan pengendalian kepegawaian, serta sistem penilaian kinerja	1. Persentase instansi yang menaati NSP bidang kepegawaian	50%	
	2. Persentase instansi yang telah dilakukan supervisi kepegawaian	50%	
	3. Persentase instansi yang telah dilakukan evaluasi implementasi SKP	50%	
	Indikator Kinerja Kegiatan		
	1. Jumlah Workshop/Rakor Kepegawaian	4 Kegiatan	
	2. Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis Kepegawaian Kantor Regional	4 Dokumen	
	3. Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kepegawaian	25 Kegiatan	
	4. Jumlah Instansi yang telah menerapkan penilaian kinerja ASN	41 Instansi	
	5. Jumlah Laporan pelaksanaan supervisi kinerja dan disiplin pegawai Kantor Regional XII BKN	5 Laporan	
	6. Jumlah Laporan pelaksanaan koordinasi dengan aparat fungsional bidang kepegawaian	2 Laporan	
7. Jumlah Laporan konsultasi Kepegawaian	300 Kegiatan		
8. Jumlah Laporan Pelaksanaan Assesment Center Kantor Regional	12 Laporan		
Meningkatkan	Indikator Kinerja Utama		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	
efektifitas koordinasi perencanaan program, pengelolaan administrasi keuangan dan sumber daya manusia	1. Indeks kepuasan publik terhadap ketersediaan layanan informasi publik	B	
	2. Persentase pengembangan kapasitas SDM Kanreg	100%	
	3. Hasil Evaluasi Inspektorat terhadap Implementasi SAKIP Kantor Regional	B	
	4. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit atas laporan keuangan Kanreg	100%	
	Indikator Kinerja Kegiatan		
	1. Jumlah Layanan Perencanaan	12 Layanan	
	2. Jumlah Pemantauan dan Evaluasi	12 Layanan	
	3. Jumlah Layanan Manajemen SDM	12 Layanan	
	4. Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	12 Layanan	
	5. Jumlah Layanan Manajemen BMN	12 Layanan	
	6. Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi	12 Layanan	
	7. Jumlah Layanan Umum	12 Layanan	
8. Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan		

Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja di atas, pada tahun 2017 Kantor Regional XII BKN melaksanakan 3 (tiga) program RPJMN, yaitu :

- a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKN (01), dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan dokumen perencanaan Kantor Regional;
 - Penyusunan dokumen laporan kinerja Kantor Regional;
 - Penyusunan dokumen laporan keuangan Kantor Regional;
 - Penyusunan dokumen pengelolaan kepegawaian;
 - Penyusunan dokumen SABMN Kantor Regional;
 - Pelaksanaan Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi;
 - Penyusunan laporan keperluan sehari – hari perkantoran;
 - Penyusunan laporan kehumasan dan keprotokolan Kantor Regional;
 - Pelaksanaan layanan perkantoran.
- b) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BKN (02), dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Pengadaan sarana dan prasarana Kantor Regional;
 - Pembangunan dan Pengembangan Gedung dan bangunan.
- c) Program penyelenggaraan manajemen kepegawaian negara (06), dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Pelaksanaan CAT Kantor Regional;
 - Pelaksanaan Assesment Center Kantor Regional;
 - Penetapan Nota persetujuan KP, PMK dan Mutasi Lainnya;
 - Penetapan NIP CPNS;
 - Penetapan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Kartu Suami;
 - Penetapan SK Pensiun;
 - Pelaksanaan bimbingan teknis kepegawaian;
 - Penyelenggaraan sosialisasi/workshop/diseminasi/seminar dan publikasi
 - Pengelolaan dokumen kepegawaian/tata naskah.

C. REKOMENDASI

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan informasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian sasaran yang berorientasi *outcome* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Berdasarkan penilaian tersebut maka Kantor Regional XII BKN Pekanbaru memperoleh nilai sebesar 62,12 (enam puluh dua koma dua belas) dengan kategori B (Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan). Oleh sebab itu kedepannya Kantor Regional XII akan memperbaiki dan lebih memperhatikan kinerja yang ada kedepannya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Regional XII BKN dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017 dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Kantor Regional XII BKN diatas 100% yang berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Kantor Regional XII BKN di tahun 2017, maka diperoleh capaian kinerja sebagaimana pada tabel 6 berikut ini :

Tabel 6. Hasil Pengukuran Kinerja Kantor Regional XII BKN Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan kualitas layanan mutasi dan status kepegawaian	Indikator Kinerja Utama			
	1. Indeks Kepuasan PNS terhadap layanan mutasi dan status kepegawaian	B	B	100%
	2. Persentase penyelesaian pelayanan mutasi dengan tepat waktu	90%	100%	110%
	3. Durasi penyelesaian pelayanan mutasi dan status kepegawaian perberkas	30 Menit	17 Menit	185%
	4. Persentase penetapan usul mutasi dan status kepegawaian dengan tepat	95%	100%	105%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Indikator Kinerja Kegiatan			
	1. Jumlah Penetapan Kenaikan Pangkat, PMK, dan Mutasi Lainnya yang ditetapkan	40.000 NP	38.375 NP	95,9%
	2. Jumlah Penetapan Karpeg/Karis/Karsu yang ditetapkan	12.000 Kartu	19.275 Kartu	160,6%
	3. Jumlah CLTN yang ditetapkan	15 NP	20 NP	133,3%
Meningkatkan kualitas layanan pengangkatan dan pensiun pegawai	Indikator Kinerja Utama			
	1. Indeks Kepuasan PNS terhadap layanan pengangkatan dan pensiun	B	A	125%
	2. Durasi penyelesaian pelayanan pengangkatan dan pensiun perberkas	60 Menit	60 Menit	100%
	3. Persentase pengelolaan tata naskah penetapan SK/Nota Pensiun ke dalam lemari tata naskah	55 %	64,2%	120,6%
	Indikator Kinerja Kegiatan			
	1. Jumlah Penetapan NIP CPNS/PNS yang ditetapkan	2.500 NIP	4.235 NIP	169,4%
	2. Jumlah Penetapan SK Pensiun yang ditetapkan	6.000 NP	6.960 NP	116%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3. Jumlah Persetujuan Teknis Pengangkatan PNS Lebih dari 2 Tahun	100 NP	1.612 NP	161,2 %
	4. Jumlah Penetapan Mutasi Keluarga Pensiunan PNS	210 NP	210 NP	100%
Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan arsip dan data kepegawaian	Indikator Kinerja Utama			
	1. Persentase akurasi data kepegawaian (updating database)	99%	98,95%	99,9%
	2. Durasi penyajian data arsip kepegawaian	10 Menit	10 Menit	100%
	3. Persentase dokumen tata naskah yang telah disusun berdasarkan NIP yang baru	60%	41,6%	70.2%
	4. Persentase instansi yang memanfaatkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	100%	100%	100%
	5. Persentase instansi yang memanfaatkan CAT	30%	24,4%	86,8%
	6. Persentase pemanfaatan Sistem Aplikasi Internal Kantor Regional	100%	100%	100%
	Indikator Kinerja Kegiatan			
	1. Jumlah Laporan Pelaksanaan CAT	12 Laporan	57 Laporan	475%
	2. Jumlah Dokumen kepegawaian yang diverifikasi	40.000 Tata Naskah	17.331 Tata Naskah	43,3%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3. Jumlah Dokumen kepegawaian yang disimpan dan dipelihara	259.436 Dokumen	181.842 Dokumen	70,1%
	4. Jumlah Dokumen kepegawaian yang direkam ke dalam CD	40.000 Data	36.360 Data	90,9%
	5. Jumlah Dokumen Laporan Statistik Kepegawaian	1 Laporan	2 Laporan	200%
	6. Jumlah Konversi NIP	814 Data	404 Data	49,6%
	7. Rekonsiliasi Data dalam Database Kepegawaian	41 Instansi	41 Instansi	100%
Meningkatkan efektifitas pembinaan / supervisi dan pengendalian kepegawaian, serta sistem penilaian kinerja	Indikator Kinerja Utama			
	1. Persentase instansi yang menaati NSP bidang kepegawaian	50%	53,66%	101,1%
	2. Persentase instansi yang telah dilakukan supervisi kepegawaian	50%	68,29%	138,6%
	3. Persentase instansi yang telah dilakukan evaluasi implementasi SKP	50%	100%	200%
	Indikator Kinerja Kegiatan			
	1. Jumlah Workshop/Rakor Kepegawaian	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
	2. Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis Kepegawaian Kantor Regional	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	3. Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kepegawaian	25 Kegiatan	61 Kegiatan	244%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	4. Jumlah Instansi yang telah menerapkan penilaian kinerja ASN	41 Instansi	41 Instansi	100%
	5. Jumlah Laporan pelaksanaan supervisi kinerja dan disiplin pegawai Kantor Regional XII BKN	5 Laporan	5 Laporan	100%
	6. Jumlah Laporan pelaksanaan koordinasi dengan aparat fungsional bidang kepegawaian	2 Laporan	2 Laporan	100%
	7. Jumlah Laporan konsultasi Kepegawaian	300 Kegiatan	692 Kegiatan	230,7 %
	8. Jumlah Laporan Pelaksanaan Assesment Center Kantor Regional	12 Laporan	12 Laporan	100%
Meningkatkan efektifitas koordinasi perencanaan program, pengelolaan administrasi keuangan dan sumber daya manusia	Indikator Kinerja Utama			
	1. Indeks kepuasan publik terhadap ketersediaan layanan informasi publik	B	B	100%
	2. Persentase pengembangan kapasitas SDM Kanreg	100%	100%	100%
	3. Hasil Evaluasi Inspektorat terhadap Implementasi SAKIP Kantor Regional	B	B	100%
	4. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit atas laporan keuangan Kanreg	100%	100%	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Indikator Kinerja Kegiatan			
	1. Jumlah Layanan Perencanaan	12 Layanan	12 Layanan	100%
	2. Jumlah Pemantauan dan Evaluasi	12 Layanan	12 Layanan	100%
	3. Jumlah Layanan Manajemen SDM	12 Layanan	12 Layanan	100%
	4. Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	12 Layanan	12 Layanan	100%
	5. Jumlah Layanan Manajemen BMN	12 Layanan	12 Layanan	100%
	6. Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi	12 Layanan	12 Layanan	100%
	7. Jumlah Layanan Umum	12 Layanan	12 Layanan	100%
	8. Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%

Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Kualitas Layanan Mutasi dan Status Kepegawaian

Capaian terwujudnya peningkatan kualitas layanan pada bidang mutasi dan status kepegawaian di Lingkungan Kantor Regional BKN tergambar dari capaian 4 indikator kinerja utama sebagai berikut :



1.1 Indeks Kepuasan PNS Terhadap Layanan Mutasi dan Status Kepegawaian

Target dari indikator ini adalah Baik (B). Untuk mengetahui nilai kepuasan PNS terhadap layanan mutasi dan status kepegawaian maka dibagikannya kuisisioner kepada seluruh PNS yang datang ke Kantor Regional XII BKN, dimana tujuannya untuk mendapatkan hasil atau tingkat kepuasan layanan sepanjang tahun 2017. Survey ini dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 40 orang.

Pengukuran menggunakan skala likert 1 - 4 yang selanjutnya dilakukan tabulasi dan hasilnya disimpulkan ke dalam predikat "tidak baik" sampai dengan "sangat baik" dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik

Dari hasil penelitian secara keseluruhan terhadap indeks kepuasan terhadap layanan yang diberikan dalam pelayanan mutasi dan status kepegawaian di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN diperoleh predikat Baik dengan nilai IKM 78,75. Nilai masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Nilai Unsur-Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai unsur pelayanan	Nilai Pelayanan yang dihasilkan
U1	Kemudahan prosedur pelayanan	2,70	3.49
U2	Kesesuaian persyaratan pelayanan	2,82	3.34
U3	Kejelasan dan kepastian	2,79	3.52
U4	Kedisiplinan	2,94	3.39
U5	Tanggung jawab	3,08	3.49
U6	Kemampuan	2,95	3.53
U7	Kecepatan pelayanan	3,05	3.19
U8	Keadilan	2,72	3.33
U9	Kesopanan dan keramahan	3,20	3.46
U10	Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal	2,67	3.43
U11	Kenyamanan	2,83	3.47
U12	Keamanan	2,61	3.38

Jika dibandingkan dengan tingkat kepuasan tahun sebelumnya maka tahun 2017 mengalami kenaikan dari 78,02 ke 78,75 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Perbandingan Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Mutasi dan Status Kepegawaian

KETERANGAN	TARGET			REALISASI		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Indikator Kinerja Utama						
Indeks Kepuasan PNS Terhadap Layanan Mutasi dan Status Kepegawaian	B	B	B	B	B	B

1.2 Persentase penyelesaian pelayanan mutasi dengan tepat waktu

Target persentase penyelesaian pelayanan mutasi dengan tepat waktu adalah 90%, dan realisasinya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan layanan mutasi kepegawaian dapat diselesaikan tepat waktu dan cepat. Hasil pencapaian melebihi dari terget yang ditetapkan. Maka dari itu kedepannya Kantor Regional XII akan lebih mempertahankan dan memperhatikan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan tepat waktu kepada masyarakat.

1.3 Durasi Penyelesaian pelayanan mutasi kepegawaian perberkas

Penyelesaian berkas kenaikan pangkat, PMK, dan mutasi lainnya dengan cepat merupakan Indikator Utama pada kinerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Target penyelesaian pelayanan mutasi kepegawaian adalah 30 menit perberkas, dan realisasinya adalah 17 menit perberkas. Dari hasil yang dicapai menunjukkan bahkan pelayanan yang diberikan baik dan mampu diselesaikan dalam waktu yang cepat. Hal ini dikarenakan penggunaan teknologi informasi yang memadai, penjadwalan yang tepat, serta koordinasi yang bai dengan Instansi yang terkait serta Penerapan Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Maka dari itu kedepannya Kantor Regional XII akan lebih mempertahankan dan memperhatikan kinerjanya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Utama 1.3

KETERANGAN	TARGET			REALISASI		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Indikator Kinerja Utama						
Durasi penyelesaian pelayanan pengangkatan dan pensiun per berkas	60 Menit	50 Menit	30 Menit	38 Menit	50 Menit	17 Menit

1.4 Persentase Penetapan Usul Mutasi dan Status Kepegawaian dengan tepat

Pada tahun 2017 target Penetapan Usul Masuk Mutasi dan Status Kepegawaian dilakukan dengan tepat adalah 40.000 NP. Alur dari penetapan Usul KP, Mutasi dan lainnya adalah Daerah mengusulkan berkas KP baik secara fisik dan sistem. Berkas usulan diterima oleh bagian tata usaha untuk diverifikasi jumlah usulannya. Dari bagian tata usaha berkas didistribusikan ke seksi instansi provinsi/instansi verikal dan seksi kabupaten/kota. Di seksi masing-masing berkas diperiksa, jika memenuhi syarat, maka berkas ditetapkan nota persetujuan teknisnya, sedangkan jika berkas ada kekurangan/tidak memenuhi syarat di kembalikan kepada instansi pengusul (BKD) untuk di lengkapi yang BTL, sedangkan untuk yang TMS (diusulkan sesudah memenuhi syarat KP).

Dari alur diatas pelaksanaan penyelesaian penetapan usul mutasi dan status kepegawaian pada tahun 2017 telah dilakukan dengan 100% tepat, hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan layanan kepegawaian dibidang mutasi dan status kepegawaian dapat diselesaikan secara akurat.

Untuk mendukung sasaran 1 maka Indikator kinerja kegiatan yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran I

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Penetapan Kenaikan Pangkat, PMK, dan Mutasi Lainnya yang	40.000 NP	38.375 NP	95,9%

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
	ditetapkan			
2.	Jumlah Penetapan Karpeg /Karis/Karsu yang ditetapkan	12.000 Kartu	19.275 Kartu	160,6 %
3.	Jumlah CLTN yang ditetapkan	15 NP	20 NP	133,3 %

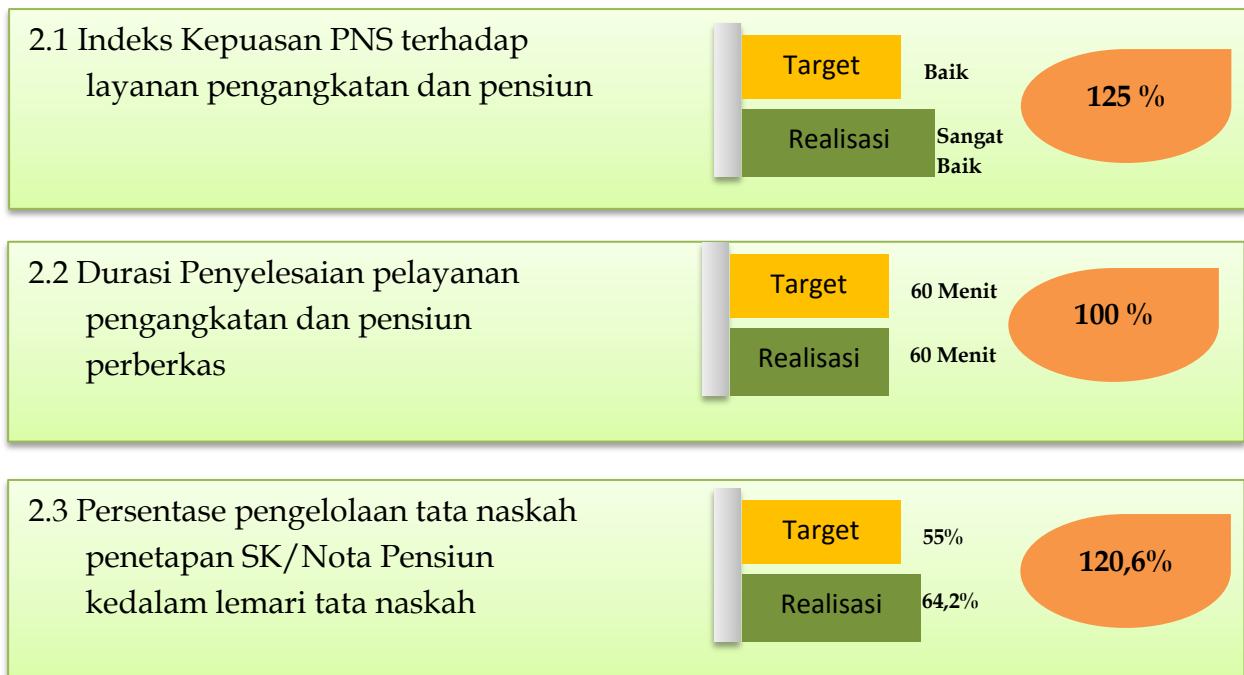
Secara keseluruhan capaian kinerja kegiatan Tahun 2017 untuk sasaran ini telah mencapai target yang telah ditetapkan. Hanya saja pada indikator jumlah Penetapan Kenaikan Pangkat, PMK, dan Mutasi lainnya yang ditetapkan tidak memenuhi target, dikarenakan usulan masuk banyak namun usulan masuk yang diACC (memenuhi syarat) tidak semuanya. Jadi jumlah realisasi sesuai dengan dokumen usulan masuk yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan, penetapan nota persetujuan ini sifatnya unpredictable. Oleh karena itu, realisasi yang dicapai sebesar 95,9%. Sementara pada capaian indikator yang lain yaitu jumlah penetapan karpeg/karis/karsu dan jumlah penetapan CLTN melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja jumlah penetapan Karpeg/Karis/Karsu yang ditargetkan untuk tahun 2017 adalah sebanyak 12.000 kartu. Pencapaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebanyak 19.275 kartu. Peningkatan usul masuk untuk penetapan Karpeg /Karis/Karsu selama tahun 2017 telah mendorong pada pencapaian kinerja yang melebihi dari target yang ditetapkan.

Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Kualitas Layanan Pengangkatan dan Pensiun Pegawai

Pada sasaran strategis 2 ini terdapat 3 indikator kinerja utama dalam hal kualitas pelayanan pengangkatan dan pensiun, dari indikator tersebut dapat menunjukkan nilai/tingkat pelayanan pegawai dibidang pengkatan dan pensiun dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat PNS diwilayah kerja

Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Berikut ini indikator kinerja utama pada sasaran strategis 2 :



2.1 Indeks Kepuasan PNS terhadap layanan pengangkatan dan pensiun

Target dari indeks kepuasan PNS terhadap layanan pengangkatan dan pensiun adalah B (Baik). Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kualitas pelayanan pengangkatan dan pensiun, dilakukan penelitian bagaimana persepsi instansi/PNS dan masyarakat umum terhadap kualitas layanan kepegawaian.

Penelitian dilakukan melalui survey kepada instansi pengguna layanan dan masyarakat dengan memberikan kuesioner yang menggunakan indikator sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah yang meliputi 12 (dua belas) unsur penilaian, yaitu prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggungjawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan.

Rincian interval serta konversi Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12. Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik

Responden yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan masyarakat ini adalah para pejabat pengelola kepegawaian baik dari instansi daerah maupun instansi vertikal di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN dan masyarakat yang memperoleh pelayanan kepegawaian langsung. Jumlah responden yang memberikan penilaian berjumlah 131 responden. Dari hasil pengolahan data berdasarkan kuesioner yang telah disebar, diperoleh nilai IKM 85,465 dengan predikat kinerja unit pelayanan Sangat Baik (A). Adapun penilaian masing-masing unsur penilaian sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Nilai Unsur-Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai pelayanan yang dihasilkan
U1	Kemudahan prosedur pelayanan	2,36	3,49
U2	Kesamaan persyaratan pelayanan	2,70	3,34
U3	Kejelasan dan kepastian	2,79	3,53
U4	Kedisiplinan	2,94	3,39
U5	Tanggung jawab	3,03	3,49
U6	Kemampuan	3,06	3,53
U7	Kecepatan pelayanan	2,33	3,19
U8	Keadilan	2,82	3,33
U9	Kesopanan dan keramahan petugas	3,27	3,46

U10	Kepastian pelaksanaan terhadap jadwal	2,39	3,43
U11	Kenyamanan	2,88	3,47
U12	Keamanan	3,15	3,38

Dari hasil penilaian masing-masing unsur tersebut, kualitas pelayanan yang perlu ditingkatkan adalah unsur kecepatan pelayanan, meskipun nilai tersebut sudah diatas nilai unsur pelayanan yang telah ditetapkan tetapi diantara 12 nilai unsur pelayanan yang ada yg paling rendah adalah nilai kecepatan pelayanan yaitu dengan nilai 3,19. Dan nilai unsur yang paling tinggi adalah unsur kemampuan dengan nilai 3,53 dimana unsur tersebut dalam memberikan pelayanan perlu dipertahankan dimasa yang akan datang.

Jika dibandingkan dengan tingkat kepuasan tahun sebelumnya maka tahun 2017 mengalami penurunan sedikit dimana pada tahun 2016 nilai yang dihasilkan yaitu sebesar 86,624, perbandingannya sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Tabel 14. Perbandingan Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Pengangkatan dan Pensiun

KETERANGAN	TARGET			REALISASI		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Indikator Kinerja Utama						
Indeks Kepuasan PNS Terhadap Layanan Pengangkatan dan Pensiun	B	B	B	B	A	A

2.2 Durasi penyelesaian pelayanan pengangkatan dan pensiun perberkas

Target dari durasi penyelesaian pelayanan pengangkatan dan pensiun per berkas adalah 60 menit, dan capaian pelayanan bisa diselesaikan dalam waktu 60 menit per berkas sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Utama 2.2

KETERANGAN	TARGET			REALISASI		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017

Indikator Kinerja Utama						
Durasi penyelesaian pelayanan pengangkatan dan pensiun per berkas	60 Menit	50 Menit	60 Menit	38 Menit	50 Menit	60 Menit

Dari hasil perbandingan realisasi tahun 2015, 2016, dan 2017 terlihat penurunan target dari tingkat durasi penyelesaian mutasi kepegawaian, namun tahun 2015 durasi penyelesaian dilakukan dengan cepat yaitu 38 menit/berkas. Pada tahun 2016 dilakukan dengan 50 menit/berkas, dan pada tahun 2017 durasi penyelesaian berkas pengangkatan dan pensiun adalah 60 menit, memenuhi target yang telah ditetapkan. Bidang pengangkatan dan pensiun telah melaksanakan kinerja yang baik dalam hal kecepatan untuk menyelesaikan dan menetapkan mengenai pengangkatan dan pensiun PNS, maka dari itu harus dipertahankan untuk tahun berikutnya.

Mengenai peningkatan kualitas pelayanan pengangkatan dan pensiun dan pelayanan mutasi dan status kepegawaian maka dilakukan upaya-upaya untuk mendukung tercapainya sasaran 2 ini yaitu:

1. Penggunaan Pusat Pelayanan Terpadu dalam memberikan layanan mutasi kepegawaian.

Dalam rangka peningkatan layanan kepegawaian yang lebih transparan, akurat, cepat, tepat, aman, efektif, efisien dan akuntabel, Kantor Regional XII BKN menggunakan layanan kepegawaian melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Dengan mengusung konsep *one stop service* maka seluruh layanan kepegawaian akan dilayani pada loket-loket PPT, PPT menerima usulan masuk dari instansi pengusul (BKD) lalu usulan masuk diverifikasi jumlahnya. Setelah itu berkas usulan masuk diteruskan ke masing-masing seksi di bidang mutasi.


2. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan dengan mengembangkan dan menggunakan aplikasi SELAIS (Sistem Elektornik Layanan ASN dan Informasi Satu Pintu) yang memiliki keunggulan antara lain:


- a. Dapat menyajikan informasi proses penyelesaian layanan mutasi kepegawaian kepada *stakeholder* yang diinformasikan melalui layar LCD pada Pusat Pelayanan Terpadu secara *realtime*;
- b. Memberikan kemudahan dalam pembuatan laporan layanan mutasi kepegawaian.
- c. Memberikan Pelayanan secara terbuka dan transparan kepada semua stakeholder.

Gambar 1. Aplikasi Selais

SELAIS
Integrated Services & Mail Tracking System

**Sistem Elektronik Layanan ASN
&
Informasi Satu Pintu**

Nama Pengguna 

..... 

Login

[Atur Ulang Kata Kunci](#)
[Daftarkan Saya!](#)

Hak cipta © 2015. Pr@komBKN12

3. Sebagai bentuk pelayanan dalam memberikan informasi publik, Kantor Regional XII BKN mengembangkan SISKAS (Sistem Informasi SMS Kepegawaian) yaitu layanan kepegawaian berbasis SMS (*Short Message Service*) yang dapat memberikan informasi terbaru, disamping itu pengguna juga dapat memberikan saran atau kritik terkait pelayanan kepegawaian di Kantor Regional XII BKN. Dengan SISKAS maka PNS dapat memperoleh informasi terbaru yang berkaitan dengan proses usulan kenaikan pangkat, pensiun dan penetapan NIP.

Gambar 2. Layanan SMS Kepegawaian



4. Penjadwalan Pelayanan Kenaikan Pangkat bagi instansi vertikal dan instansi daerah yang ada di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN yang tujuannya antara lain: Guna memastikan ketepatan waktu penyelesaian pemberian persetujuan kenaikan pangkat; Guna memastikan tidak terjadi penumpukan beban di akhir batas waktu periode kenaikan pangkat; Guna meningkatkan kualitas pemberian persetujuan kenaikan pangkat.

Pelayanan Kenaikan Pangkat berbasis *less paper*, pelayanan ini masih diperuntukkan bagi kenaikan pangkat reguler dengan maksud meningkatkan percepatan layanan kepegawaian yakni dengan mengurangi persyaratan administratif yang sebelumnya masih memerlukan dokumen fisik tetapi kini dialihkan medianya menjadi dokumen elektronik yang diunggah ke *cloud system* yang dibangun oleh Kantor Regional XII BKN yang dinamakan *own cloud*. Dan juga untuk meningkatkan efisiensi sehingga instansi tidak perlu datang langsung ke Kantor Regional untuk membawa usulan kenaikan pangkat.

Gambar 3. Owncloud



5. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Mutasi Kepegawaian dengan tujuan agar pengelola kepegawaian memahami lebih dalam mengenai peraturan kepegawaian khususnya yang berkaitan dengan teknis pengangkatan, mutasi dan pensiun sehingga mampu menciptakan persamaan persepsi dalam menyelesaikan masalah kepegawaian dan pada akhirnya dapat mempercepat pelayanan kepegawaian karena dapat mengurangi jumlah berkas yang tidak lengkap (BTL) dalam proses usulan kepegawaian.

2.3 Persentase pengelolaan tata naskah penetapan SK/Nota Pensiun kedalam lemari tata naskah

Target penyelesaian pengelolaan tata naskah penetapan SK/Nota Pensiun kedalam lemari tata naskah adalah 55% dan realisasinya sebesar 64,2%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dokumen SK Pensiun telah dilakukan dengan baik. Dari hasil capaian indikator kinerja utama diatas, berikut indikator kegiatan dari sasaran strategis 2 :

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran II

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Penetapan NIP CPNS/PNS yang ditetapkan	2.500 NIP	4.235 NIP	169,4%
2.	Jumlah Penetapan SK Pensiun yang ditetapkan	6.000 NP	6.960 N P	116%
3.	Jumlah Persetujuan Teknis Pengangkatan PNS Lebih dari 2 Tahun	100 NP	1.612 NP	161,2%
4.	Jumlah Penetapan Mutasi Keluarga Pensiunan PNS	210 NP	210 NP	100%

Pada Indikator jumlah penetapan NIP CPNS/PNS yang ditetapkan sepanjang tahun 2017 dapat terealisasi sebesar 4.235 NIP dari target yang ditetapkan sebanyak 2.500 NIP. Pencapaian dapat melebihi target ini dikarenakan adanya Formasi

Penetapan NIP CPNS PTT Kemenkes, Formasi THL - TB Penyuluh Pertanian, Formasi Guru Garis Depan, dimana semua penetapan NIPnya dilakukan di tahun 2017.

Sedangkan pada layanan penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang telah mencapai batas usia pensiun serta Janda/Dudanya, Kantor Regional XII BKN berupaya agar SK pensiun PNS dapat diterbitkan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat mutu dengan cara menetapkan target bahwa SK Pensiun paling lambat telah ditetapkan dan diterimakan kepada PNS yang bersangkutan 3 (tiga) bulan sebelum TMT pensiun. Sehingga sifat pokok dari pemberian pensiun, yaitu penghargaan dan jaminan hari tua bagi PNS dapat tercapai. Dalam tahun 2017 realisasi ini telah melampaui target yang ditetapkan sebanyak 5.000 SK. Hal ini terjadi karena jumlah usul yang disampaikan instansi selama tahun 2017 melebihi target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Persetujuan Teknis Pengangkatan PNS Lebih dari 2 tahun capaiannya sangat tinggi. Hal ini bisa terjadi karna daerah terlambat mengangkat PNS nya (lebih dari 2 tahun) dimana berbagai banyak alasan yang mengakibatkan belum diangkat sampai dengan 2 tahun. Oleh karena itu kinerja ini sulit untuk bisa diprediksi

Dari tabel diatas, diambil kesimpulan bahwa seluruh indikator capaian kinerja kegiatan pada sasaran strategis 2 telah berhasil dicapai, melebihi dari target yang telah ditetapkan. Kedepannya Kantor Regional XII BKN akan lebih memperhatikan target kinerja kegiatan yang akan disesuaikan kedepannya. Maka dalam hal kinerja dalam pelayanan pengangkatan dan mutasi kepegawaian dinilai berhasil.

Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Kualitas Sistem Pengelolaan Arsip dan Data Kepegawaian

Sasaran Strategis 3 ini pada bidang sistem informasi dan kepegawaian yang kinerjanya dalam upaya pengelolaan arsip dan data kepegawaian di Kantor

Regional XII BKN Pekanbaru. Sasaran strategis 3 capaiannya untuk terwujudnya sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan arsip dan data kepegawaian tergambar dari 6 indikator sebagai berikut :



3.1 Persentase Akurasi Data Kepegawaian (Updating database)

Beberapa upaya yang dilakukan untuk memperoleh data kepegawaian yang update/terkini yaitu :

- a. Pelaksanaan fasilitasi penggunaan SAPK oleh seluruh instansi vertikal dan instansi daerah untuk peremajaan data dan proses layanan kepegawaian sehingga diperoleh data kepegawaian yang lengkap, akurat, valid dan terkini;

- b. Pelaksanaan rekonsiliasi data pada proses kenaikan pangkat otomatis sesuai dengan amanat Peraturan Kepala BKN No. 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah;
- c. Proses updating oleh operator SAPK Kantor Regional XII BKN maupun operator SAPK dari instansi sesuai kewenangannya;

Dari seluruh kegiatan yang terkait dengan updating data, serta dari laporan peremajaan data oleh operator SAPK sewilayah kerja Kantor Regional XII BKN maka jumlah data yang diupdate melalui SAPK pada tahun 2017 berjumlah 37.534 data. Dengan demikian realisasi indikator kinerja utama Persentase akurasi data kepegawaian yang update/terkini tahun 2017 tercapai sebesar 98,95%. Persentase data kepegawaian yang diupdate dari tahun ketahun tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Utama 3.1

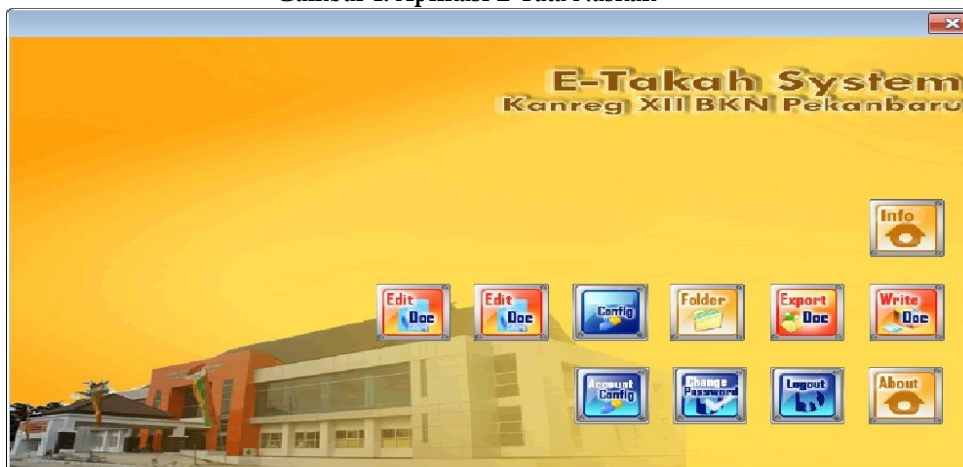
KETERANGAN	TARGET			REALISASI		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Indikator Kinerja Utama						
Persentase akurasi data kepegawaian (updating database)	95%	99%	99%	83%	95,5%	98,95%

3.2 Durasi penyajian data arsip kepegawaian

Dalam rangka mempermudah penyusunan dan pencarian kembali arsip kepegawaian, Kantor Regional XII BKN telah membangun Sistem Aplikasi E-takah. Dengan menggunakan aplikasi ini, waktu yang dibutuhkan untuk pencarian dokumen arsip kepegawaian per tata naskah kepegawaian di dalam lemari tata naskah dapat lebih cepat. Dan pada tahun 2017 pencapaian dari durasi penyajian data arsip kepegawaian adalah 10 menit perberkas. Dengan hasil tersebut

menunjukkan bahwa dalam menyajikan data kepegawaian seluruh PNS Di wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN dapat menyajikannya dengan cepat dan tepat.

Gambar 4. Aplikasi E-Tata Naskah



3.3 Persentase Dokumen Tata Naskah yang telah disusun berdasarkan NIP yang baru

Pengalihan penyusunan arsip kepegawaian dari pusat ke Kantor Regional telah dilakukan sejak tahun 2009 dan proses penyusunan dokumen masih berdasarkan NIP yang lama. Namun semenjak tahun 2017 Kantor Regional XII BKN melakukan pengelolaan dokumen takah berdasarkan NIP yang baru dan menggunakan *Barcode Code*. Pencapaian yang telah dilakukan sampai dengan bulan desember 2017 yaitu sebesar 41,6% pengelolaan dokumen tata naskah. Tidak tercapainya sesuai target dikarenakan terkendala pada kurangnya sampul takah biru dan roll o'pack untuk penyimpanan dokumen takah. Maka kedepannya Kantor Regional XII BKN akan lebih memperhatikan media penyimpanan dokumen takah dan menyediakan anggaran untuk pengadaan sampul takah dan roll o'pack.

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Utama 3.3

KETERANGAN	TARGET			REALISASI		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Indikator Kinerja Utama						
Persentase dokumen tata	25%	20%	60%	21,67%	19,07%	41,6 %

naskah yang telah disusun berdasarkan NIP yang baru					
---	--	--	--	--	--

3.4 Persentase instansi yang memanfaatkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan sistem pengelolaan arsip dan data kepegawaian maka seluruh usul penetapan NIP, pemberian Persetujuan/Pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS, Penetapan Keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS dan penetapan keputusan pindah instansi harus diusulkan oleh instansi baik instansi daerah maupun instansi vertikal melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang dapat diakses secara online sesuai dengan amanat Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Prosedur Penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan Perpindahan Antar Instansi berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara online (SAPK Online).

Oleh karena itu seluruh instansi diwilayah kerja Kantor Regional XII BKN sebanyak 41 (empat puluh satu) instansi daerah provinsi/kabupaten/kota dan 26 (dua puluh enam) instansi vertikal telah menggunakan SAPK. Dengan demikian target indikator kinerja utama Persentase Instansi yang memanfaatkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) tercapai sebesar 100%.

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Utama 3.4

KETERANGAN	TARGET			REALISASI		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Indikator Kinerja Utama						
Persentase instansi yang memanfaatkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.5 Persentase Pemanfaatan Sistem Aplikasi Internal Kantor Regional

Untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian diwilayah Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, maka Kantor Regional membuat Aplikasi Internal seperti SELAIS (Sistem Elektronik Layanan ASN Informasi Satu Pintu) yang menyajikan data proses penyelesaian mutasi dan pensiun serta Aplikasi E-Takah yaitu pengelolaan dan pencarian dokumen tata naskah kepegawaian. Aplikasi Internal tersebut 100% pada tahun 2017 telah digunakan dalam proses pelayanan kepegawaian serta manfaat dari adanya aplikasi internal ini juga telah dirasakan oleh seluruh *stakeholder*.

Gambar 5. Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian



Realisasi capaian Indikator Kinerja Kegiatan untuk sasaran meningkatnya kualitas sistem pengelolaan arsip dan data kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran III

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1. Jumlah Laporan Pelaksanaan CAT	12 Laporan	57 Laporan	475%
2. Jumlah Dokumen Kepegawaian yang diverifikasi	40.000 Tata Naskah	17.331 Tata Naskah	43,3%
3. Jumlah Dokumen Kepegawaian yang disimpan dan dipelihara	259.436 Dokumen	181.842 Dokumen	70,1%
4. Jumlah Dokumen Kepegawaian yang direkam ke dalam CD	40.000 Data	36.360 Data	90,9%
5. Jumlah Laporan Statistik Kepegawaian	1 Laporan	2 Laporan	200%
6. Jumlah Perbaikan Konversi NIP	814 Data	404 Data	49,6%
7. Rekonsiliasi Data dalam database Kepegawaian	41 Instansi	41 Instansi	100%

Pada tahun 2017, adanya beberapa kegiatan/seleksi yang menggunakan Fasilitas CAT yaitu: Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (Talentpool), Pelaksanaan Ujian Seleksi Ikatan Dinas, Pelaksanaan Tes Seleksi CPNS Kompetensi Dasar dan Kompetensi Bidang. Dengan banyaknya seleksi yang dilaksanakan maka terdapat instansi yang menggunakan layanan CAT baik layanan CAT di Kantor Regional XII BKN, Kantor UPT BKN Padang, maupun di layanan CAT secara mandiri. Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan CAT Kanreg XII BKN sejumlah 18 instansi yang terdiri:
 - Instansi Vertikal : 16 instansi
 - Instansi Daerah : 2 instansi
2. Pelaksanaan CAT Mandiri sejumlah 32 instansi yang terdiri:
 - Provinsi Riau : 6 instansi
 - Provinsi Sumbar : 18 instansi
 - Provinsi Kepri : 8 instansi

Dari data diatas disampaikan bahwa penyusunan Laporan Pelaksanaan CAT dilakukan berdasarkan masing-masing kegiatan (1 kegiatan 1 laporan). Oleh karena hal tersebut maka laporan yang dihasilkanpun melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu 57 pelaksanaan ujian yang menggunakan Fasilitas CAT (57 Laporan).

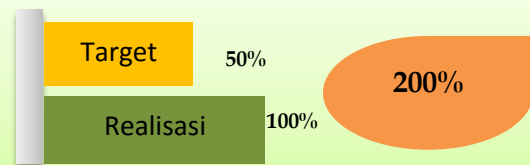
Terkait dengan hal tersebut di atas, dari 40.000 tata naskah kepegawaian yang diverifikasi untuk tahun 2017 telah terealisasi sebanyak 17.331 takah, sedangkan dokumen kepegawaian yang terekam telah terealisasi sebesar 36.360 data. Dan pada dokumen kepegawaian yang disimpan dan dipelihara hanya terealisasi sebesar 70,1%. Hal ini disebabkan kurangnya sampul takah biru dan roll O'pack sebagai media penyimpanan tata naskah sehingga para pegawai tidak bisa melaksanakan kinerja pengelolaan tata naskah. Kedepannya Kantor Regional XII BKN akan lebih berkoordinasi dengan bidang yang terkait dan juga memperhatikan alokasi anggaran untuk pengadaan Sampul Takah Biru dan Roll O'Pack.

Sasaran Strategis 4
Meningkatkan Efektifitas Pembinaan/Supervisi dan Pengendalian Kepegawaian, serta Sistem Penilaian Kinerja

Capaian terwujudnya sasaran meningkatkan efektifitas pembinaan/supervisi dan pengendalian kepegawaian, serta sistem penilaian kinerja tergambar dari capaian 3 indikator sebagai berikut :



4.3 Persentase Instansi yang telah dilakukan evaluasi implementasi SKP



4.1 Persentase Instansi yang menaati NSP Bidang Kepegawaian

Selama tahun 2017 Persentase Instansi yang menaati NSP bidang kepegawaian sesuai dengan target yang ditentukan yaitu 50%. Berdasarkan data yang dihimpun Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kantor Regional XII BKN, masih banyak masyarakat PNS yang belum menaati NSP bidang kepegawaian, adapun pelanggaran peraturan bidang kepegawaian berkaitan dengan berikut ini :

1. Keberatan dan Banding Administratif;
2. Peninjauan kembali atas Keputusan Bupati;
3. Penjatuhan hukuman disiplin, dan;
4. Keberatan atas pemecatan.

Pelanggaran peraturan kepegawaian tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat PNS khususnya pengelola kepegawaian serta terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai upaya terus dilaksanakan untuk menekan tingkat pelanggaran ini, mulai dari sosialisasi peraturan kepegawaian hingga pemberian penjelasan secara langsung maupun melalui surat termasuk konsultasi kepegawaian.

Berdasarkan hasil kinerja dari tahun 2017 terdapat penurunan tingkat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dari tahun 2016. Hal ini disebabkan semakin banyaknya PNS yang memahami dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat penurunnya seperti tabel yang terlampir dibawah ini:

Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Utama 5.1

KETERANGAN	TARGET			REALISASI		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Indikator Kinerja Utama						
Persentase Instansi yang menaati NSP bidang kepegawaian	25%	50%	50%	50%	60%	53,66 %

4.2 Persentase Instansi yang telah dilakukan supervisi kepegawaian

Pada Kantor Regional XII BKN terdapat pelaksanaan supervisi kepegawaian terhadap seluruh instansi diwilayah kerja. Target yang ditetapkan yaitu 50% dari total seluruh instansi diwilayah kerja harus dilakukan supervisi kepegawaian oleh Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian, dan hasil yang dicapai sebesar 68,29%

4.3 Persentase Instansi yang telah dilakukan evaluasi implementasi SKP

Berkaitan dengan penilaian kinerja/SKP ASN, jumlah instansi yang telah melakukan evaluasi implementasi SKP di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN sebesar 100%, keseluruhan instansi telah melakukan evaluasi terhadap SKP. Adapun Instansi yang telah melakukan evaluasi implementasi SKP dapat dilihat di Tabel di bawah ini :

Tabel 22. Daftar Instansi yang menerapkan Penilaian Kinerja ASN

NO.	INSTANSI
a. Instansi Daerah	
a.1. Provinsi Sumatera Barat	
1.	PROV. SUMATERA BARAT
2.	KAB. AGAM
3.	KAB. PASAMAN
4.	KAB. LIMPULUH KOTA
5.	KAB. SOLOK
6.	KAB. PADANG PARIAMAN
7.	KAB. PESISIR SELATAN
8.	KAB. TANAH DATAR
9.	KAB. SIJUNJUNG
10.	KAB. KEP. MENTAWAI

11.	KAB. SOLOK SELATAN
12.	KAB. DHARMASRAYA
13.	KAB. PASAMAN BARAT
14.	KOTA BUKITTINGGI
15.	KOTA PADANG PANJANG
16.	KOTA SAWAHLUNTO
17.	KOTA SOLOK
18.	KOTA PADANG
19.	KOTA PAYAKUMBUH
20.	KOTA PARIAMAN
a.2. Provinsi Riau	
1.	PROVINSI RIAU
2.	KAB. KAMPAR
3.	KAB. BENGKALIS
4.	KAB. INDRAGIRI HULU
5.	KAB. INDRAGIRI HILIR
6.	KAB. PELALAWAN
7.	KAB. ROKAN HULU
8.	KAB. ROKAN HILIR
9.	KAB. SIAK
10.	KAB. KUANTAN SINGINGI
11.	KAB. KEP. MERANTI
12.	KOTA PEKANBARU
13.	KOTA DUMAI
a.3. Provinsi Kepulauan Riau	
1.	PROVINSI KEP. RIAU
2.	KAB. BINTAN
3.	KAB. KARIMUN
4.	KAB. NATUNA
5.	KAB. LINGGA
6.	KAB. KEP. ANAMBAS
7.	KOTA BATAM
8.	KOTA TANJUNGPINANG
b. Instansi Vertikal Di Wilayah Kerja Kanreg XII	
1.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
2.	Kementerian Pertahanan
3.	Kementerian Hukum dan HAM
4.	Kementerian Keuangan
5.	Kementerian Pertanian
6.	Kementerian Perhubungan
7.	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
8.	Kementerian Kesehatan

9.	Kementerian Agama
10.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11.	Kementerian Sosial
12.	Kementerian Kehutanan
13.	Kementerian Komunikasi dan Informatika
14.	Kementerian Perindustrian
15.	Kejaksaan Agung
16.	Mahkamah Agung
17.	Badan Pemeriksa Keuangan
18.	Badan Kepegawaian Negara
19.	Badan Pusat Statistik
20.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
21.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
22.	Badan Pertanahan Nasional
23.	Badan Pengawasan Obat dan Makanan
24.	Kepolisian Negara RI
25.	Badan Meteorologi, Klimatologi Geofisika
26.	BNP2TKI

Untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan kepegawaian, Tahun 2017 Kantor Regional XII BKN juga menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi, workshop dan sejumlah sosialisasi di Kantor Regional XII BKN. Berikut sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan :

Tabel 23. Daftar Workshop dan Rapat Koordinasi Tahun 2017

No.	Kegiatan	Peserta	Jadwal Pelaksanaan	Tempat
1	Rapat Koordinasi Teknis Kepegawaian Se-Wilayah Kerja	Kepala BKD dan Pimpinan Instansi Vertikal se-wilayah kerja Kantor Regional XII BKN	24 Januari 2017	Aula Kantor Regional XII BKN
2	Workshop Perhitungan Indeks Profesionalitas PNS Se-Wilayah	Kepala BKD dan Inspektur Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-wilayah kerja Kantor Regional XII BKN	24 - 25 Pebruari 2017	Hotel Inna Garuda Yogyakarta

No.	Kegiatan	Peserta	Jadwal Pelaksanaan	Tempat
	Kerja			
3	Rapat Koordinasi Teknis Kepegawaian Se-Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Kepala BKD dan Pimpinan Instansi Vertikal se-wilayah kerja Kantor Regional XII BKN	24 Mei 2017	Hotel Grand Jatra Pekanbaru
4	Rapat Koordinasi Teknis Mutasi Kepegawaian	Kepala BKD dan Inspektur Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-wilayah kerja Kantor Regional XII BKN	28 - 29 Nopember 2017	Aula Kantor Regional XII BKN

Gambar 6. Rapat Koordinasi Kepegawaian se-wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru





Kantor Regional XII BKN Pekanbaru juga telah melaksanakan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kepegawaian kepada instansi dengan pembiayaan dari anggaran instansi masing-masing yang berjumlah 61 Kegiatan dari target 25 kegiatan. Dan Instansi yang telah menerapkan penilaian kinerja ASN sesuai dengan target yaitu 41 instansi.

Dalam rangka peningkatan disiplin pegawai Kantor Regional XII BKN, bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian telah melaksanakan supervisi

kinerja dan disiplin pegawai secara rutin terhadap seluruh unit kerja. Pelaksanaan supervisi tersebut dituangkan dalam laporan pelaksanaan supervisi kinerja dan disiplin pegawai Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sejumlah 5 laporan dari target 5 laporan.

Untuk indikator kinerja kegiatan Jumlah Pelaksanaan koordinasi dengan aparat fungsional bidang kepegawaian, terealisasi sebanyak 2 laporan dari target 2 Laporan, sehingga tercapai target 100 %.

Adapun indikator kinerja kegiatan pada sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran IV

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1. Jumlah workshop / rakor kepegawaian	4 kegiatan	4 kegiatan	100 %
2. Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis Kepegawaian Kantor Regional	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
3. Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis/ sosialisasi kepegawaian	25 kegiatan	61 kegiatan	244%
4. Jumlah instansi yang telah menerapkan penilaian kinerja ASN	41 instansi	41 instansi	100 %
5. Jumlah laporan pelaksanaan supervisi kinerja dan disiplin pegawai Kantor Regional XII BKN	5 laporan	5 laporan	100%
6. Jumlah Laporan Pelaksanaan koordinasi dengan aparat fungsional bidang kepegawaian.	2 laporan	2 laporan	100%
7. Jumlah Layanan Konsultasi Kepegawaian	300 Kegiatan	692 Kegiatan	230,7%
8. Jumlah Laporan Pelaksanaan Assesment Center Kantor Regional	12 Laporan	12 Laporan	100%

Sasaran Strategis 5

Meningkatkan Efektifitas Koordinasi Perencanaan Program, Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Sumber Daya Manusia

Pada sasaran strategis 5 capaiannya untuk terwujudnya sasaran meningkatkan efektifitas koordinasi perencanaan program, pengelolaan administrasi keuangan dan sumber daya manusia tergambar dari 6 indikator sebagai berikut :



5.1 Indeks Kepuasan Publik terhadap ketersediaan layanan informasi publik

Target dari indikator ini adalah B. Untuk mengetahui persepsi pegawai terhadap indikator ini dilakukan penelitian dengan membagikan kuesioner kepada seluruh pegawai Kantor Regional XII BKN sebagai responden yang berjumlah 67 orang.

Pengukuran menggunakan skala likert 1 - 4 yang selanjutnya dilakukan tabulasi dan hasilnya disimpulkan ke dalam predikat “tidak baik” sampai dengan “sangat baik” dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25. Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik

Dari hasil penelitian secara keseluruhan terhadap indeks kecukupan kepuasan publik terhadap ketersediaan layanan informasi yang diberikan *supporting unit* Kantor Regional XII BKN Pekanbaru diperoleh predikat Baik dengan nilai IKM 75,029. Nilai masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 26. Nilai Unsur-Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai unsur pelayanan	Nilai Pelayanan yang dihasilkan
U1	Kemudahan prosedur pelayanan	2,66	2,99
U2	Kesesuaian persyaratan pelayanan	2,70	3,04
U3	Kejelasan dan kepastian	2,79	3,03
U4	Kedisiplinan	2,91	2,92
U5	Tanggung jawab	3,03	3,07
U6	Kemampuan	3,02	3,05
U7	Kecepatan pelayanan	2,73	2,89
U8	Keadilan	2,82	2,97
U9	Kesopanan dan keramahan	2,90	2,99
U10	Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal	2,59	2,90
U11	Kenyamanan	2,88	3,11
U12	Keamanan	3,05	3,05

Dari hasil penilaian masing-masing unsur tersebut, kualitas pelayanan yang perlu ditingkatkan adalah unsur kecepatan pelayanan pada supporting unit dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada pegawai di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dan unsur tanggungjawab dalam memberikan layanan informasi perlu dipertahankan dimasa yang akan datang.

Jika dibandingkan dengan tingkat kepuasan tahun sebelumnya maka tahun 2017 mengalami penurunan dari 75,268 ke 75,029, hal ini disebabkan juga karena sedikitnya koresponden yang diteliti, hasil perbandingannya sebagaimana terlihat pada grafik berikut :

Tabel 27. Perbandingan Indeks Kepuasan Publik Terhadap Ketersediaan Layanan Informasi Publik

KETERANGAN	TARGET			REALISASI		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Indikator Kinerja Utama						
Indeks Kepuasan Publik Terhadap Ketersediaan Layanan Informasi Publik	B	B	B	B	B	B

5.2 Persentase pengembangan kapasitas SDM Kanreg

Seiring dalam upaya untuk peningkatan pelayanan di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru maka harus dilakukan juga peningkatan kualitas dan kapasitas SDM dari Pegawai . Pada Tahun 2017 terdapat berbagai pelatihan/diklat/workshop yang telah diikuti oleh sebagian pegawai di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Adapun kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Diklat Kepemimpinan Tk. IV di Ciawi Bogor
2. Pelatihan Bendahara Pengeluaran di Ciawi Bogor
3. Pelatihan Bendahara Penerimaan di Ciawi Bogor
4. Workshop Peningkatan Kapsitas dan Pengembangan SDM Auditor Kepegawaian di BKN Pusat
5. Pelatihan Fungsional Auditor Kepegawaian di Ciawi Bogor

6. Diklat Costumer Service Enhancement di Jakarta
7. Diklat Jabatan Arsiparis di Bogor

Dari pelatihan/diklat/workshop yang telah dilakukan pada tahun 2017, persentase peningkatan/pengembangan kapasitas SDM Kanreg XII BKN tercapai sesuai target yaitu 100%. Pada tahun berikutnya terdapat banyaknya diklat/pelatihan yang akan dilaksanakan sehingga lebih banyak pegawai yang akan diikutsertakan dalam upaya pengembangan SDM Kanreg.

5.3 Hasil Evaluasi Inspektorat terhadap Implementasi SAKIP Kantor Regional

Target dari Indikator Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Berdasarkan Evaluasi Inspektorat output yang ditetapkan secara keseluruhan tercapai dalam arti capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya dan outcome memiliki capaian dan kinerja yang baik dan masih perlu untuk melaksanakan tindak lanjut atas reuiu tersebut untuk tahun berikutnya.

Berdasarkan penilaian tersebut maka Kantor Regional XII BKN Pekanbaru memperoleh nilai sebesar 62,12 (enam puluh dua koma dua belas) dengan kategori B (Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan).

5.4 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit atas Laporan Keuangan Kanreg

Target dari tindak lanjut rekomendasi hasil audit atas laporan keuangan Kantor Regional XII BKN adalah B, dan hasil capaian tindak lanjutnya adalah B. Hal ini disebabkan pada tahun 2017 pemeriksaan atas Laporan Keuangan T.A 2017 telah dilakukan oleh Inspektorat.

Dan capaian indikator kinerja kegiatan pada sasaran II ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 28. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran V

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1. Jumlah Layanan Perencanaan	12 Layanan	12 Layanan	100%
2. Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi	12 Layanan	12 Layanan	100%
3. Jumlah Layanan Manajemen SDM	12 Layanan	12 Layanan	100%
4. Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	12 Layanan	12 Layanan	100%
5. Jumlah Layanan Manajemen BMN	12 Layanan	12 Layanan	100%
6. Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi	12 Layanan	12 Layanan	100%
7. Jumlah Layanan Umum	12 Layanan	12 Layanan	100%
8. Jumlah Layanan Perkantoran	12 Layanan	12 Layanan	100%

Hasil dari layanan perencanaan yaitu Dokumen perencanaan disusun sebanyak 5 (lima) dokumen yaitu Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2017, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, RAB Tahun 2018, RKAKL T.A 2018 dan DIPA TA 2018. Untuk Laporan kinerja juga telah disusun 5 (lima) Laporan yaitu, LKJ tahun 2016 serta laporan E-Monev triwulan I sampai dengan IV Tahun 2017. Selain itu juga telah dilaksanakan penyusunan laporan keuangan semester II tahun 2016 dan semester I tahun 2017. Pengelolaan kepegawaian dalam Layanan Manajemen SDM dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengembangan, mutasi, penataan organisasi dan tata laksana, kesejahteraan pegawai, disiplin dan kinerja serta pemeliharaan tata naskah pegawai yang dirangkum dalam 1 (satu) dokumen pengelolaan kepegawaian.

Pada Tahun 2017 juga telah dilaksanakan penyusunan 2 (dua) laporan SABMN semester II tahun 2016 dan semester I tahun 2017. Untuk Layanan Umum telah disusun 3 (tiga) laporan, antara lain Laporan Pelayanan Kesehatan Pegawai, Laporan Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan, dan Laporan Pemeliharaan Sarana Kantor dan Lingkungan. Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi

Kantor Regional XII BKN selama tahun 2017 disusun ke dalam 4 (empat) laporan, yaitu 1 (satu) Laporan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan, 2 (dua) Laporan penerbitan Majalah/Buletin Kepegawaian dan 1 (satu) laporan pengelolaan website Kantor Regional XII BKN. Sedangkan untuk Laporan Layanan Perkantoran telah diselenggarakan selama 12 (dua belas) bulan layanan selama Tahun 2017.

Pemenuhan standar sarana dan prasarana Kantor Regional XII BKN dilakukan secara bertahap, dengan mendahulukan kegiatan prioritas dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada setiap tahunnya dan diharapkan dapat meningkat ditahun mendatang melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara bertahap sehingga akan mendukung jalannya pelaksanaan tugas. Namun secara umum sarana dan prasarana di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru pada tahun 2017 telah terpenuhi sesuai standar.

Selama tahun 2017, Kantor Regional XII BKN telah mengadakan sarana dan prasarana kantor berupa Pengadaan Meubelair Kantor, Mesin Potong Rumput dan Stabilizer. Selain itu terdapat Pengembangan Gedung Aula dan Pengembangan Jalan Lingkungan berupa pembuatan jalan paving block rumah dinas jabatan pengawas.

Gambar 7. Pengembangan Jalan Kantor Regional XII BKN Tahun 2017



Gambar 8. Pengembangan Gedung Aula Kantor Regional XII BKN Tahun 2017



B. Realisasi Anggaran

1. Pagu Anggaran Kantor Regional XII BKN TA 2017

Anggaran belanja Kantor Regional XII BKN merupakan bagian anggaran BKN, dan berdasarkan Surat Pengesahan Petikan DIPA Kantor Regional XII BKN Nomor SP DIPA-088.01.2.667901/2016 Tanggal 07 Desember 2016, Pagu Awal Anggaran TA 2017 adalah sebesar Rp. 11.278.456.000,-, Revisi ke 1 (satu) SP DIPA-088.01.2.667901/2017 Tanggal 22 Juni 2017 anggaran menjadi Rp. 11.339.161.000,- dan berdasarkan Revisi ke 4 (empat)/ terakhir DIPA Petikan Nomor SP DIPA-088.01.2.667901/2017 Tanggal 27 Oktober 2017, Anggaran Kantor Regional XII BKN TA 2017 setelah revisi menjadi sebesar Rp. 10.918.994.000,-.

Adapun Anggaran tersebut untuk membiayai 3 (tiga) program RPJMN yang dilaksanakan Kantor Regional XII BKN, dengan rincian :

- a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN (01), sebesar Rp. 8.752.325.000,-. Anggaran pada program ini untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Belanja Pegawai (051) sebesar Rp. 5.231.218.000,-
 - 2) Belanja Barang (052) sebesar Rp. 3.521.107.000,-
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN (02), sebesar Rp. 254.175.000,-. Anggaran pada program ini untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran (053) sebesar Rp. 24.175.000,-
 - 2) Pembangunan dan Renovasi Gedung (054) sebesar Rp. 230.000.000,-
- c) Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara (06), sebesar Rp. 1.912.494.000,-. Anggaran pada program ini untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengelolaan pelayanan kepegawaian berbasis CAT Kantor Regional sebesar Rp. 527.796.000,-

- 2) Pelaksanaan Assesment Center Kantor Regional sebesar Rp. 40.000.000,-
- 3) Penetapan NPKP, PMK dan Mutasi Lainnya sebesar Rp. 172.000.000,-
- 4) Penetapan NIP CPNS sebesar Rp. 24.000.000,-
- 5) Penetapan Karpeg, Karis/Karsu sebesar Rp. 29.000.000,-
- 6) Penetapan SK Pensiun sebesar Rp. 79.000.000,-
- 7) Penyelenggaraan sosialisasi/workshop/diseminasi/seminar/publikas sebesar Rp. 100.698.000,-
- 8) Bimbingan teknis kepegawaian sebesar Rp. 605.000.000,-
- 9) Pengelolaan tata naskah sebesar Rp. 335.000.000,-

Tabel 29. Rincian Alokasi Anggaran Per Program (dalam rupiah)

No	Program	Jumlah
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN (01)	8.752.325.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN (02)	254.175.000
3	Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara (06)	1.912.494.000
Jumlah		10.918.994.000

Tabel 30. Rincian Alokasi Anggaran Per Belanja (dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Pegawai (51)	5.231.218.000
2	Belanja Barang (52)	5.040.601.000
3	Belanja Modal (53)	647.175.000
Jumlah		10.918.994.000

2. Realisasi Anggaran Kantor Regional XII BKN TA 2017

Realisasi anggaran Kantor Regional XII BKN TA 2017 adalah sebesar Rp. 10.715.615.090,- atau sebesar 98,14% dari total anggaran, dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 31. Realisasi Anggaran Per Program (dalam rupiah)

Kode	Program	Anggaran				
		Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN	8.752.325.000	8.658.815.323	99,02	93.509.677	0,98
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN	254.175.000	252.285.000	99,26	1.890.000	0,74
06	Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara	1.912.494.000	1.804.514.767	94,35	107.979.233	5,65
Jumlah		10.918.994.000	10.715.615.090	98,14	203.378.910	1,86

Tabel 32. Realisasi Anggaran Per Belanja (dalam rupiah)

Kode	Jenis Belanja	Anggaran				
		Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
51	Belanja Pegawai	5.231.218.000	5.216.620.799	99,72	14.597.201	0,28
52	Belanja Barang	5.040.601.000	4.860.255.980	96,42	180.345.020	3,58
53	Belanja Modal	647.175.000	638.738.311	98,70	8.436.689	1,30

Dari tabel diatas dapat diketahui realisasi anggaran untuk TA 2017 sangat baik yang mencapai 98,14%, dan seluruh kegiatan yang tertuang di dalam Dokumen Anggaran tersebut (DIPA) telah tercapai seluruhnya dan sisa anggaran sebesar Rp. 203.378.910 (1,86%).

BAB IV PENUTUP

LKJ Kantor Regional XII BKN tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Kantor Regional XII BKN selama tahun 2017 yang diawali dengan penjabaran visi dan misi BKN, sasaran strategis dengan indikator kinerja utamanya dan realisasi capaian terhadap sasaran strategis dimaksud.

Dari sisi pengelolaan keuangan, hasil capaian penyerapan anggaran Kantor Regional XII BKN pada tahun 2017 sebesar 98,14%, bila dibandingkan dengan tahun 2016 pencapaian anggaran pada tahun 2017 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 sebesar 96,69%. Pada tahun anggaran 2017 sisa anggaran sebesar Rp. 203.378.910 dikarenakan terdapat sisa dari belanja barang, perjalanan dinas, efisiensi dari hasil pengadaan barang dan jasa, dan penghematan kegiatan lainnya.

Sedangkan dari sisi pencapaian kinerja menunjukkan bahwa terdapat 21 Indikator Kinerja Utama berhasil mencapai target yang telah ditetapkan bahkan terdapat yang melebihi dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2017, Kantor Regional XII BKN menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 21 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan. Mengacu kepada 5 sasaran strategis dengan 21 indikator kinerja utama tersebut, secara umum dari 21 IKU tersebut telah berhasil dicapai dan sebagian melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Adapun indikator kinerja kegiatan terdapat sebanyak 30 IKK yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan IKK telah berhasil dicapai dengan realisasi yang hampir melebihi target, namun ada sebagian IKK yang tidak dapat mencapai target dikarenakan berbagai faktor yang menjadi penyebab, terkait dengan *stakeholder*, antara lain usulan dari instansi tidak sebesar target yang ditetapkan, keterbatasan sarana dan prasarana juga mempengaruhi capaian target kinerja, dan faktor lainnya sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu. Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Kantor Regional XII BKN diatas 100% yang berdasarkan

persentase rata-rata capaian sasaran. Terhadap kegiatan yang belum mencapai target dilakukan evaluasi lebih lanjut dan akan dilakukan perbaikan di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja yang telah diraih oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru yang pada berbagai sasaran strategis dan indikator kinerja utama Kantor Regional XII BKN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hasil ini dari evaluasi pencapaian kinerja dalam laporan ini merupakan bahan pembelajaran yang baik bagi Kantor Regional XII untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Untuk itu kedepan, dengan memperhatikan evaluasi tersebut Kanreg XII BKN akan mengupayakan langkah-langkah perbaikan secara konkrit dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

SARAN

1. Adanya Kendala dan Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target Indikator Sasaran yang telah ditentukan dapat menjadi fokus untuk peningkatan di tahun mendatang.
2. Peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan semua instansi, baik BKN Pusat sebagai Instansi Pembina dan wilayah kerja secara lebih intensif dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan manajemen kepegawaian yang prima dan efektif di Instansi Daerah/Vertikal.

LAMPIRAN